

Research Paper

## Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi di Banyuwangi

Ahmad Najib Rabbani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeristas Brawijaya, Malang, Indonesia

Corresponding author: [najibrbn@gmail.com](mailto:najibrbn@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci

*Pemberdayaan Ekonomi  
Masyarakat Pesisir  
ICZM*

#### Riwayat artikel

Direvisi: 20 April 2025

Diterima: 10 Juni 2025

Tersedia online: 27 Juni 2025

### ABSTRAK

Artikel ini membahas strategi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar di wilayah pesisir. Namun, masyarakat pesisir sering menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Melalui pendekatan ICZM, langkah-langkah konkret seperti menciptakan lapangan kerja alternatif, mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dan teknologi baru, serta membangun solidaritas dan aksi kolektif di tengah masyarakat dapat dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir dalam mengelola usaha ekonomi mereka secara efektif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan.

### ABSTRACT

This article discusses strategies to improve the economic empowerment of coastal communities through the ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) approach. As an archipelagic country, Indonesia has great natural resource potential in coastal areas. However, coastal communities often face complex socio-economic challenges. Through the ICZM approach, concrete steps such as creating alternative jobs, bringing communities closer to new sources of capital and technology, and building solidarity and collective action in the community can be taken to improve their economic empowerment. By involving various parties such as the

---

---

Ministry of Marine Affairs and Fisheries, local governments, and non-governmental organizations, it is hoped that these efforts can have a positive impact on coastal communities in managing their economic efforts effectively. This approach is carried out using a qualitative descriptive approach based on a literature review.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



---

## Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas laut yang lebih besar daripada luas daratan. Negara ini memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, yang merupakan 18,4% dari garis pantai dunia (Wirayawan dkk., 2005). Area laut Indonesia terletak di dekat khatulistiwa terkenal memiliki banyak ragam sumber daya alam, baik yang tidak dapat pulih seperti tambang maupun yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan lainnya. Pesisir yang merupakan tempat peralihan antara ekosistem darat dan laut memiliki banyak sumber daya alam dan ekowisata yang rentan dinikmati oleh banyak orang. Masyarakat di daerah pesisir sering kali menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi, di mana beberapa kelompok mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada hasil laut sebagai sumber penghasilan mereka, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sektor perikanan adalah dasar perekonomian mereka. Persepsi umum tentang kebutuhan hidup keluarga nelayan dan umumnya masyarakat pesisir telah berkembang sebagai akibat dari tingginya unsur ketidakpastian dalam melaut, khususnya bagi masyarakat pesisir. Sejarah keluarga miskin yang bergantung pada apa yang diberikan laut sering memberikan gambaran tentang tekanan yang ada.

Peran pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan sangat penting untuk mengembangkan dan mendukung pemanfaatan subsektor perikanan dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah juga harus diimbangi dengan kualitas SDM yang menjadi bagian dari skala prioritas dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut (Reressy et al., 2016). Oleh karena itu, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir merupakan salah satu langkah penting yang harus direncanakan dan diterapkan untuk mengakhiri rantai kemiskinan di wilayah pesisir (Citra, 2017). Pendekatan terpadu seperti ICZM menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini karena mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (ICZM) adalah pengelolaan yang mempertimbangkan seluruh sektor yang terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu didefinisikan sebagai pengelolaan berdasarkan pendekatan secara komprehensif, yang mencakup kebijakan, kewenangan lembaga, dan hukum yang diperlukan untuk pembangunan dan perencanaan suatu kawasan pesisir dan laut (Kristiyanti, 2016). Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan elemen kunci dari pendekatan ICZM. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses kepada mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting dalam implementasi strategi ICZM. Melalui strategi ini, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi masyarakat lokal dapat ditingkatkan. Pesisir merupakan suatu wilayah yang menghubungkan antara daratan dan lautan. Terdapat dua jenis batas wilayah pesisir jika dilihat dari garis pantai yaitu, batas yang sejajar dengan garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Namun, belum ada yang setuju tentang penetapan batas wilayah pesisir yang tegak lurus terhadap garis pantai. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir setiap Negara berbeda karena setiap Negara memiliki sistem pemerintahan, sumber daya lingkungan, dan karakteristik tersendiri (Mariana, 2016).

Sumber daya di pesisir terdiri dari dua jenis yaitu, sumber daya alam yang dapat pulih dan tidak dapat pulih. Sumber daya alam yang dapat pulih seperti, perikanan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat pulih seperti, bijih besi, pasir, timah, bauksit, minyak gas, dan mineral, serta bahan tambang lainnya. Banyaknya sumber daya alam Pantai menjadikan masyarakat di daerah pesisir bergantung pada hasil alam tersebut, akibatnya banyak dari Masyarakat pesisir yang mengalami krisis perekonomian (Dirhamsyah, 2006). Pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah pesisir adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pantai atau pesisir. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan akses, pengendalian, dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat atas sumber daya alam dan peluang ekonomi di wilayah mereka. Pemberdayaan ekonomi pesisir dimulai dengan mengakui pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan yang memengaruhi ekonomi mereka. Melalui forum-forum partisipatif, pertemuan komunitas, dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, masyarakat pesisir dapat berkontribusi pada proses pengembangan ekonomi mereka sendiri pantai (Reressy et al., 2016).

Salah satu tujuan utama pemberdayaan ekonomi pesisir adalah diversifikasi mata pencaharian, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sektor atau sumber pendapatan saja. Dalam hal ini perlu adanya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kemitraan yang kuat dan saling

mendukung, upaya pemberdayaan ekonomi pesisir dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kapasitas, meningkatkan akses, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah pesisir memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pantai (Reressy et al., 2016).

Pada tahun 1993 dalam konferensi pesisir dunia di Belanda, pendekatan ICZM pertama kali diperkenalkan. Dirhamsyah (2006) menyatakan bahwa pengelolaan kawasan pesisir secara integrasi dikenal sebagai ICZM, yang merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola kawasan pesisir. Pendekatan ICZM ini telah dikembangkan secara hati-hati selama bertahun-tahun. Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), "ICZM adalah suatu kesatuan sistem yang terintegrasi memiliki hubungan terhadap tujuan lokal, regional, nasional, dan internasional." ICZM ini berfokus pada hubungan antara berbagai aktivitas dan pengelolaan sumber daya di kawasan pesisir, serta hubungan antara aktivitas di kawasan pesisir dengan aktivitas di tempat lain (OECD, 1993) dalam Dirhamsyah (2006). Erosi, polusi, perubahan iklim, urbanisasi, dan pariwisata meningkatkan tekanan pada wilayah pesisir. Tidak hanya ekosistem yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari tekanan tersebut, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan pesisir dianggap sangat penting dalam hal ini. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) adalah pendekatan yang dikenal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan merupakan pedoman untuk mengelola kawasan pesisir secara terpadu. Pendekatan ICZM ini memerlukan kemampuan institusi untuk menangani masalah intersektoral, seperti lintas disiplin ilmu, kewenangan-kewenangan dari lembaga pemerintah, dan batas-batas kelembagaan (Hinrichsen, 1998).

Sebagai zona transisi antara lingkungan darat dan laut, wilayah pesisir dipengaruhi oleh perubahan dan tekanan dari darat dan laut. Pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan dan penelitian yang terpadu dengan ekosistem, yang melibatkan masyarakat global dan regional, serta mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi. Tujuan ICZM sendiri yaitu menyelesaikan masalah saat ini dan masa depan dengan pembangunan pesisir dan lautan. Memberdayakan masyarakat pesisir, yang juga dikenal sebagai stakeholder, untuk menikmati keuntungan jangka panjang dari pembangunan. Pada dasarnya, ICZM adalah ide tentang pengelolaan pesisir yang memasukkan peran masyarakat. Diharapkan masyarakat akan bertanggung jawab atas wilayah pesisir yang mereka huni. ICZM pada dimensi sosial ekonomi berdasarkan pada pola dan laju perkembangan yang harus dikelola dengan baik sehingga total demand terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplay yang ada.

Ada beberapa keunggulan dari ICZM, diantaranya yaitu Memberi kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk membangun sumber daya secara

berkesinambungan. ICZM dapat membantu mengidentifikasi peluang ekonomi baru dan mempromosikan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat pesisir. Menciptakan peluang baru bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengintegrasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan, pertanian pesisir, pariwisata, dan industri kreatif. ICZM dapat membantu melindungi dan mempertahankan aset ekonomi penting bagi masyarakat pesisir, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan lahan basah. Ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya ini tetap tersedia bagi generasi mendatang.

## **Metode**

Penelitian ini **menggunakan** pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*) dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Banyuwangi. Lokasi penelitian dipusatkan pada wilayah pesisir Banyuwangi, khususnya di kawasan Pantai Merah, Muncar, dan sekitarnya, yang merupakan daerah dengan potensi kelautan dan perikanan tinggi serta terlibat dalam program pengelolaan terpadu.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam dengan masyarakat pesisir (nelayan, pedagang, pengolah hasil laut). Pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata). Lembaga/LSM yang terlibat dalam ICZM. Observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi dan praktik pengelolaan pesisir Studi dokumentasi terhadap regulasi, program pemerintah, data statistik ekonomi lokal, dan laporan kegiatan ICZM Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan langkah-langkah **yaitu** reduksi data – memilah data yang relevan. Penyajian data – disusun dalam bentuk narasi dan tabel. Penarikan Kesimpulan berdasarkan pola hubungan antara pengelolaan pesisir dan dampaknya pada ekonomi masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Sumber Daya Masyarakat Pesisir**

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir dan sumber daya ekonominya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Definisi ini dapat diperluas karena banyak orang bergantung pada sumber daya laut untuk hidup mereka. Mereka terdiri dari pemilik dan buruh nelayan, pembudidaya ikan dan makhluk laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, dan penyedia faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan,

masyarakat pesisir juga bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata dan transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang hidup dari sumber daya laut dan non-hayati lainnya (Dietrich, 2002). Sebagian dari masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah, tetapi lebih banyak dari mereka yang hidup secara subsisten melalui bisnis dan kegiatan ekonomi mereka. Mereka bekerja dalam skala yang sangat kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga mereka.

Menurut UU No.45 Tahun 2009 nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima grosston (GT). Dahuri (2003) menjelaskan bahwa di setiap wilayah pesisir dan lautan terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya, baik alami maupun buatan. Ekosistem alami termasuk terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, estuaria, laguna, dan delta.

Sumber daya di wilayah pesisir dan lautan terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan yang tidak dapat pulih. Sumber daya yang dapat pulih termasuk sumber daya perikanan laut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan bahan bioaktif, sedangkan sumber daya yang tidak dapat pulih termasuk gas, mineral, pasir, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya dan berbagai jenis energi kimiawi. Sumber daya dan ekosistem ini dapat berfungsi sebagai aset ekonomi, ekologi, pendidikan, penelitian, pertahanan, dan keamanan negara.

### **Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Pesisir**

Utami,(2010) menyatakan bahwa masyarakat miskin sering dikaitkan dengan masyarakat pesisir. Disebut miskin karena banyak masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut, meskipun mereka memiliki modal usaha yang kecil, peralatan tangkap konvensional, dan sistem penangkapan yang sederhana. Dengan demikian, penduduk pesisir, menerima hasil ikan yang sangat sedikit. Belum lagi pekerjaan mereka bergantung pada alam. Nelayan tidak selalu dapat mencari ikan di laut dengan bebas, tetapi mereka mengacu pada musim dan iklim. Pada musim barat, cuaca mendukung untuk mencari ikan, tetapi pada musim timur, atau paceklik, nelayan tidak dapat bergantung pada hasil melaut. Ketidakpastian musim dan iklim ini menghalangi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup. Namun, kita harus menyadari bahwa potensi alam laut ini memiliki kelemahan. Misalnya, nelayan tidak selalu dapat berlayar untuk mencari ikan karena kondisi cuaca dan iklim. Faktor keselamatan pelaut adalah alasan mengapa tidak setiap musim nelayan dapat berlayar di laut. Selain itu, karena tempat berlayar sering

dieksploitasi, nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan hasil laut. Banyak nelayan yang masih mengambil hasil laut dengan perahu dan peralatan tradisional yang dapat menimbulkan masalah.

Program dan aktivitas untuk menangani hal tersebut telah dilakukan. Namun, hasil yang diperoleh belum mencapai tingkat hasil terbaik. Jumlah dan luas penduduk di pesisir terus meningkat. Motorisasi armada nelayan skala kecil, pembangunan prasarana perikanan, dan penerapan sistem rantai dingin adalah beberapa program pemerintah. Pembuatan karang buatan, penanam kembali hutan bakau, konservasi wilayah laut dan spesies ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang merugikan adalah program pembangunan lainnya yang berkaitan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup.

Selain itu, pola bisnis yang semakin populer di hampir seluruh Indonesia adalah perikanan inti rakyat, suatu sistem bisnis di mana nelayan berfungsi sebagai plasma dan perusahaan berfungsi sebagai inti. Namun demikian, harus diakui bahwa upaya kelembagaan ini belum menghasilkan manfaat yang jelas bagi nelayan. Hanya sedikit perusahaan nelayan yang bertahan meskipun banyak yang didirikan. Seiring berjalannya waktu, banyak lembaga nelayan juga perlahan-lahan runtuh dan tidak berfungsi lagi. Dengan cara yang sama, banyak kemitraan nelayan dan perusahaan besar berhenti beroperasi karena tidak adilnya pembagian hasil, resiko, dan biaya. Sebaliknya, nelayan menentang pola kemitraan swasta-nelayan.

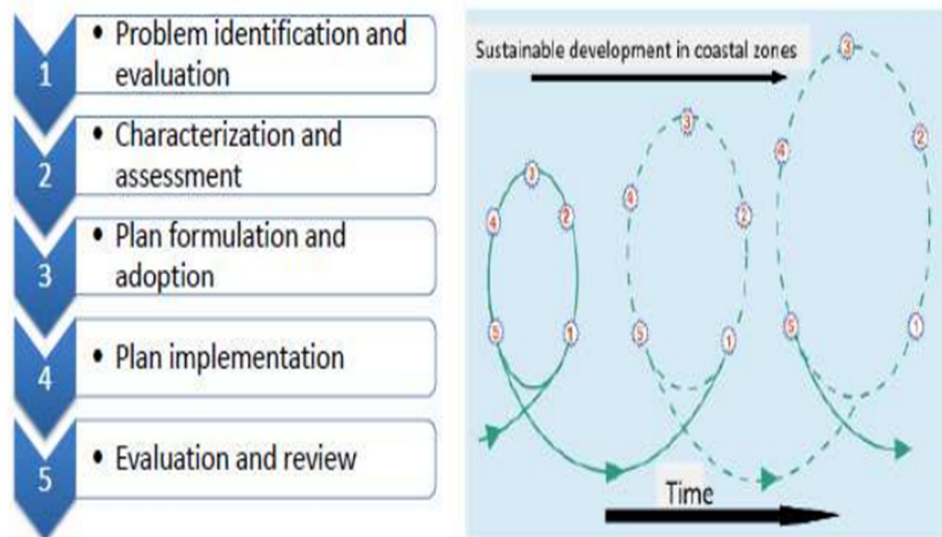
Menurut Nikijukuw, 2023, terdapat lima pendekatan yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir pantai, diantaranya yaitu:

1. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga.
2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri.
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar
5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif ditengah masyarakat.
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir dalam keterampilan yang diperlukan untuk mengelola usaha ekonomi mereka dengan efektif, seperti keterampilan manajemen bisnis, teknologi pertanian laut, dan pemasaran produk.
7. Beberapa model dan instrumen Agenda Hijau, Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Aksi Lingkungan, dan Model ICZM

Ketujuh pendekatan ini dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan maupun instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan khususnya lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk yayasan dan koperasi yang telah banyak melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir pantai. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan guna peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*).

### Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir melalui Pendekatan ICZM

Mengingat bahwa kawasan pesisir menawarkan ruang yang luas dan murah dibandingkan dengan ruang daratan, kawasan pesisir di Indonesia berkembang dengan sangat cepat sebagai akibat dari negara kepulauan. Oleh karena itu, penduduk sering menuju pesisir sebagai tempat tujuan perjalanan mereka. Hampir 60% dari orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar tinggal di wilayah pesisir (Adibroto, 1999: 125; Dahuri, et al, 200). Kota-kota di wilayah pesisir Indonesia biasanya memiliki banyak fungsi, termasuk sebagai sumber daya alam, pusat industri dan pelabuhan, perikanan, pariwisata, dan permukiman. Selain itu, sebagian besar kota-kota di Indonesia berada di kawasan pesisir, yang menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan pesisir merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ini berkaitan dengan kemudahan akses dan hubungan antar pulau dan wilayah.



**Gambar 1. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Sumber: Invemar (2003) dalam Trujillo dan Mouthon (2013)

ICZM adalah pendekatan yang dikenal untuk pengelolaan wilayah pesisir yang mencakup kebijakan dan kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk membangun dan merencanakan pengelolaan wilayah pesisir dengan tujuan lingkungan hidup dan melibatkan seluruh sektor yang terkait (Post and Landin, 1996). ICZM berusaha untuk mengoptimalkan potensi keuntungan yang diperoleh dari wilayah pesisir dan meminimalkan efek buruk yang dihasilkan oleh pengelolaan wilayah pesisir, baik pada sumber daya alam maupun lingkungan hidup. Konferensi Pesisir Dunia (1993) di Belanda adalah tempat pertama istilah "Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (PWPT)" digunakan yang dikenal dengan istilah ICZM. Forum tersebut menganggap PWPT sebagai proses yang paling tepat untuk menangani masalah pengelolaan pesisir saat ini dan jangka panjang. Masalah-masalah ini termasuk kehilangan habitat, penurunan kualitas air karena pencemaran, perubahan siklus hidrologi, penurunan sumber daya pesisir, kenaikan muka air laut, dan konsekuensi dari perubahan iklim global (Subandono et al., 2009).

Selain itu, Subandono et al. (2009) menyatakan bahwa konsep PWPT menawarkan kerangka perencanaan dan pengelolaan yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Faktor-faktor ini termasuk birokrasi yang berfokus pada satu sektor, konflik kepentingan, kurangnya prioritas, kurangnya kepastian hukum, kurangnya pengetahuan tentang kedudukan wilayah dan faktor sosial lainnya. Pemberdayaan masyarakat dan eksistensi masyarakat harus diinternalisasi dalam pengembangan, perencanaan, dan implementasi sistem pengelolaan sumber daya pesisir yang terintegrasi. Hingga evaluasi, faktor kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam proses perencanaan harus ditingkatkan. Masyarakat lokal, pemerintah (pusat dan daerah), LSM, media, swasta, donor, organisasi internasional, dan komunitas ilmunan adalah semua bagian dari kemitraan pengelolaan pesisir.

## **Kesimpulan**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) dapat dilakukan dengan model baru yang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir pantai. Pendekatan ICZM akan memberikan kemudahan lebih besar kepada masyarakat pesisir pantai dalam mengakses sumber daya laut melalui zona ekonomi eksklusif dan ruang tata kelola, yang sangat penting bagi banyak negara pesisir, terutama SIDS. Dengan

pendekatan ICZM, tidak hanya pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir pantai saja yang akan membaik, tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proposional oleh segenap pihak yang terlibat (stakeholders), dan dapat memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir yang baik sehingga dapat melestarikan wilayah pantai. Untuk menyeimbangkan hasil antara manusia dan lingkungan kesejahteraan di wilayah pesisir, inisiatif ICZM harus menyediakan kerangka kelembagaan. Untuk menghasilkan kekayaan, sumber daya yang dapat digunakan, akan tetapi hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan program yang berkaitan dengan lingkungan, mendukung pendidikan, dan menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk mendukung keberlanjutan, pemerintah berorientasi ICZM juga harus membangun kerangka kerja yang mendukung kemitraan publik swasta

### **Referensi**

- Diarto, Hendrarto, B., & Suryoko. (2012). Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Lingkungan Kawasa Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Dirmansyah. (2006). Pengelolaan Wilayah Pesisir Terintegrasi di Indonesia. *Jurnal Oseana*.
- Fadel, M. (2009). Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah Jakarta. *Gramdia*.
- Fajriansyah, & Darma, D. (2017). Upaya Pengelolaan Potensi Kelautan Berbasis *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* di Kampung Kasai Kepulauan Derawan. *SNMEB*.
- IR. Darmawan, M. (2001). Penyusunan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*). ISBN.
- Kurniasari, N., & Reswat, E. (2011). Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Buletin Sosek Kelautan dan Perikanan*.
- M, F. (t.thn.). Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah Jakarta. *Gramedia*.

- Muhammad Yaslan, R. S. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandar Bakau Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*.
- Nugroho, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberda Sumberdaya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan*.
- Supartoyo, Y. H., & Kasmiasi. (t.thn.). Pendekatan *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* Untuk Kota Hijau Pesisir Tropis Berkelanjutan Di Indonesia..
- Susanto, A. (2019). Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara Berbasis *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*.